COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Achfrilia Anggie Sumampouw
NPP. 33.0836
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: sumampouwanggie@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Suraji, S. Sos., M. AP
Email: surajisurajisuraji1972@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Stunting remains a public health issue that requires cross-sectoral intervention due to its multidimensional causes. Although the prevalence of stunting in North Minahasa Regency has shown a declining trend, its implementation still faces several challenges, including differences in public understanding of stunting, suboptimal community participation, and the need to strengthen coordination among stakeholders. Therefore, a collaborative governance approach is required to create synergy among actors in efforts to reduce stunting prevalence.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze collaborative governance in efforts to reduce the prevalence of stunting in North Minahasa Regency, North Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study employed a qualitative method with a descriptive approach to collaborative governance based on Ansell and Gash's theory. Data were collected through semi-structured interviews involving 19 informants, observations, and documentation. The collected data were analyzed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings indicate that collaborative governance in reducing stunting prevalence in North Minahasa Regency has been implemented through four main dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. The initial conditions of collaboration were supported by shared goals among stakeholders, although differences in public understanding of stunting still existed. Institutional design was manifested through the Stunting Prevention and Reduction Acceleration Team (TP3S), coordination forums, and clear task distribution. Facilitative leadership was carried out through coordination, facilitation, and stakeholder empowerment functions. Meanwhile, the collaborative process was reflected in dialogue, trust-building, mutual commitment, and shared understanding in implementing stunting reduction programs.* ***Conclusion:*** *Collaborative governance in efforts to reduce stunting prevalence in North Minahasa Regency has been implemented relatively well through stakeholder involvement, institutional support, facilitative leadership, and a sustainable collaborative process.*

Keywords: *Collaborative Governance; North Minahasa; Stunting.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan yang memerlukan penanganan lintas sektor karena penyebabnya yang multidimensional. Meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan kecenderungan menurun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai stunting, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta perlunya penguatan koordinasi antar stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *collaborative governance* untuk mewujudkan sinergi antar aktor dalam upaya penurunan prevalensi stunting. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsif terhadap *collaborative governance* comenurut Teori Ansell Gash. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (19 informan),observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan melalui empat dimensi utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Kondisi awal kolaborasi didukung oleh adanya tujuan bersama antar stakeholder meskipun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai stunting. Desain kelembagaan diwujudkan melalui TP3S, forum koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas. Kepemimpinan fasilitatif dijalankan melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan stakeholder. Sementara itu, proses kolaborasi berlangsung melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman bersama dalam pelaksanaan program penurunan stunting. **Kesimpulan:** ***C****ollaborative governance* dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai stakeholder, dukungan kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance*; Minahasa Utara; Stunting.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan manusia yang mendapat perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dampak stunting tidak hanya terlihat pada terhambatnya pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Oleh karena itu, stunting tidak lagi dipandang semata sebagai masalah kesehatan, melainkan sebagai permasalahan pembangunan yang dapat memengaruhi daya saing suatu bangsa (World Health Organization, 2014; Leroy & Frongillo, 2019).

Permasalahan stunting memiliki karakteristik yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi kesehatan ibu dan anak, akses terhadap pangan bergizi, sanitasi lingkungan, pendidikan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kompleksitas tersebut menyebabkan upaya penanganan stunting tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai sektor dan pemangku kepentingan secara terpadu. Bhutta et al. (2020) menegaskan bahwa keberhasilan negara-negara dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan sumber daya lintas sektor secara berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi

antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas percepatan penurunan stunting.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pendekatan *collaborative governance* menjadi salah satu strategi yang relevan untuk mengatasi permasalahan stunting yang bersifat multidimensional. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan pengaturan tata kelola yang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif guna menyelesaikan permasalahan publik. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya aktor utama, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong terbangunnya kerja sama, koordinasi, dan sinergi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan *collaborative governance* dalam penanganan stunting menjadi penting mengingat keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu agenda prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pendekatan konvergensi melalui keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat dalam pelaksanaan intervensi stunting. Komitmen tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh intervensi kesehatan spesifik, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai program pendukung yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh berbagai sektor pembangunan (UNICEF, 2020; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Meskipun berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan oleh pemerintah, permasalahan stunting masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Utara masih berada pada angka 20,8 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stunting masih menjadi permasalahan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan dalam upaya penurunan stunting adalah Kabupaten Minahasa Utara. Adapun jumlah balita stunting di Kabupaten Minahasa Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita Stunting
Kema	Kema	66
Kauditan	Kauditan	7
Airmadidi	Airmadidi	3
Kalawat	Kolongan	2
Dimembe	Dimembe	5
Talawaan	Talawaan	9
Wori	Wori	68
Wori	Tinongko	15
Likupang Barat	Mubune	50
Likupang Timur	Likupang	2
Likupang Selatan	Batu	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, 2026

Berdasarkan Tabel 1, jumlah balita stunting di Kabupaten Minahasa Utara tercatat sebanyak 229 kasus yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan Wori, Kecamatan Kema, dan Kecamatan Likupang Barat merupakan wilayah dengan jumlah kasus stunting tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaran kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih memerlukan perhatian dan penanganan yang berkelanjutan. Tingginya jumlah kasus pada beberapa kecamatan mengindikasikan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya membutuhkan intervensi kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah membentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dalam struktur tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berperan sebagai koordinator utama, sedangkan Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan intervensi kesehatan spesifik. Selain itu, keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor secara berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008).

Meskipun mekanisme kolaborasi telah dibentuk melalui TP3S, pelaksanaan penanganan stunting di Kabupaten Minahasa Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil penelitian awal, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor, sinkronisasi data antarinstansi, pemerataan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, serta optimalisasi partisipasi stakeholder dalam mendukung pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan berbagai aktor dalam suatu forum kolaborasi belum secara otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif, melainkan memerlukan komitmen, komunikasi, dan koordinasi yang berkesinambungan agar tujuan bersama dapat tercapai. Sebagaimana dikemukakan oleh Lahat dan Sher-Hadar (2020), keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung terbentuknya kolaborasi, termasuk kesamaan tujuan, kepercayaan antaraktor, dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penanganan stunting di Kabupaten Minahasa Utara menjadi menarik untuk dikaji melalui perspektif collaborative governance. Analisis terhadap proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder diperlukan untuk memahami bagaimana sinergi antarpemangku kepentingan dibangun dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas kolaborasi lintas sektor pada program percepatan penurunan stunting.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Permasalahan stunting telah menjadi perhatian berbagai peneliti dalam beberapa tahun terakhir, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan

keterlibatan pemerintah, sektor kesehatan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara luas karena karakteristik permasalahannya yang bersifat multidimensional (Bhutta et al., 2020; Vaivada et al., 2020). Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance banyak digunakan sebagai kerangka analisis dalam menjelaskan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penurunan stunting.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji collaborative governance dalam penanganan stunting di berbagai daerah. Faidati dan Sukanti (2021) menemukan bahwa keberhasilan penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh sinergi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penelitian Faldianus (2022) menunjukkan bahwa collaborative governance berperan penting dalam upaya penanggulangan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, Hidayasa et al. (2023) menemukan bahwa percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan memerlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat antar stakeholder agar program dapat berjalan secara efektif. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sutikno dan Naufal (2023) yang menunjukkan bahwa proses collaborative governance menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan stunting di tingkat desa.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan pentingnya collaborative governance dalam penanganan stunting, sebagian besar penelitian masih berfokus pada identifikasi bentuk kolaborasi, peran stakeholder, dan efektivitas pelaksanaan program. Penelitian yang secara khusus menganalisis proses collaborative governance berdasarkan dimensi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) masih relatif terbatas, khususnya pada konteks pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting melalui mekanisme TP3S di Kabupaten Minahasa Utara. Kesenjangan tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat stunting masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan manusia yang memerlukan penanganan secara terintegrasi melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian collaborative governance dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penanganan stunting pada tingkat pemerintah daerah. Dari aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam memperkuat sinergi program percepatan penurunan stunting. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi kebijakan karena hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S). Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai dinamika collaborative governance yang berlangsung dalam penanganan stunting, sehingga perumusan strategi penguatan kolaborasi berpotensi kurang tepat sasaran dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di lapangan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai collaborative governance dalam penanganan stunting telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus dan lokus penelitian. Penelitian terdahulu menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kajian yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi posisi penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Faidati dan Sukanti (2021) mengenai collaborative governance dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan stunting dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor yang mampu membangun koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan program. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada identifikasi bentuk kolaborasi yang terjadi tanpa mengkaji secara mendalam proses collaborative governance yang berlangsung.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hidayasa et al. (2023) mengenai collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh komitmen stakeholder dan keberlangsungan koordinasi antaraktor. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas program dibandingkan analisis proses collaborative governance secara komprehensif.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nuranita Putri dan Nurcahyanto (2021) mengenai collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Desa Kalirandu, Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program stunting. Namun penelitian tersebut berfokus pada tingkat desa sehingga memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian keempat dilakukan oleh Sutikno dan Naufal (2023) mengenai proses collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Desa Winduaji, Kabupaten Brebes. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar stakeholder menjadi faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi di tingkat desa dan belum mengkaji keterlibatan organisasi perangkat daerah secara lebih luas.

Penelitian kelima dilakukan oleh AlfaFatikha et al. (2023) mengenai collaborative governance dalam penanganan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya pendekatan collaborative governance dalam penanganan stunting, namun belum secara spesifik mengkaji dinamika kolaborasi pada konteks Kabupaten Minahasa Utara.

Penelitian keenam dilakukan oleh Simangunsong, Hutasoit, dan Jafa (2025) mengenai dynamic governance dalam penurunan stunting di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan adaptasi kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas penanganan stunting, namun menggunakan perspektif dynamic governance yang berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan perspektif collaborative governance.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian telah membahas pentingnya kolaborasi dalam penanganan stunting. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji proses collaborative governance menggunakan model Ansell dan Gash (2008) pada konteks penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan studi collaborative governance pada bidang pemerintahan dan kebijakan publik.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas collaborative governance dalam penanganan stunting. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada identifikasi bentuk kolaborasi, peran stakeholder, serta efektivitas pelaksanaan program penurunan stunting pada berbagai daerah. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) yang meliputi dimensi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada karakteristik objek penelitian yang berfokus pada pelaksanaan kolaborasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) di Kabupaten Minahasa Utara. Melalui fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk kerja sama antar stakeholder, tetapi juga menganalisis dinamika proses kolaborasi yang berlangsung dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian collaborative governance pada bidang pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan stunting.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif melalui penggalian informasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi secara faktual di lapangan (Sugiyono, 2022; Simangunsong, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Minahasa Utara sebagai informan kunci karena berperan sebagai koordinator Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Penyuluh Keluarga Berencana, Tim Pendamping Keluarga, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana program, dan kelompok sasaran.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh guna memastikan kesesuaian informasi dengan

kondisi yang sebenarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan keakuratan data penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan fokus pada organisasi perangkat daerah dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Pengumpulan data dilakukan selama pelaksanaan penelitian sebagaimana tercantum dalam tahapan penelitian skripsi, mulai dari proses observasi awal, wawancara mendalam, dokumentasi, hingga analisis data. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya kasus stunting serta adanya mekanisme kolaborasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) yang menjadi fokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *collaborative governance* dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008). Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi antar stakeholder dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Kondisi Awal

Menurut Ansell dan Gash (2008), *starting conditions* merupakan kondisi awal yang memengaruhi terbentuknya proses *collaborative governance*. Kondisi tersebut mencakup karakteristik para aktor yang terlibat, insentif untuk berkolaborasi, serta berbagai hambatan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan kerja sama. Dalam konteks upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara, kondisi awal kolaborasi menjadi penting karena permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, organisasi masyarakat, serta masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Gambar 1. Visualisasi Hasil Analisis NVivo Dimensi Kondisi Awal

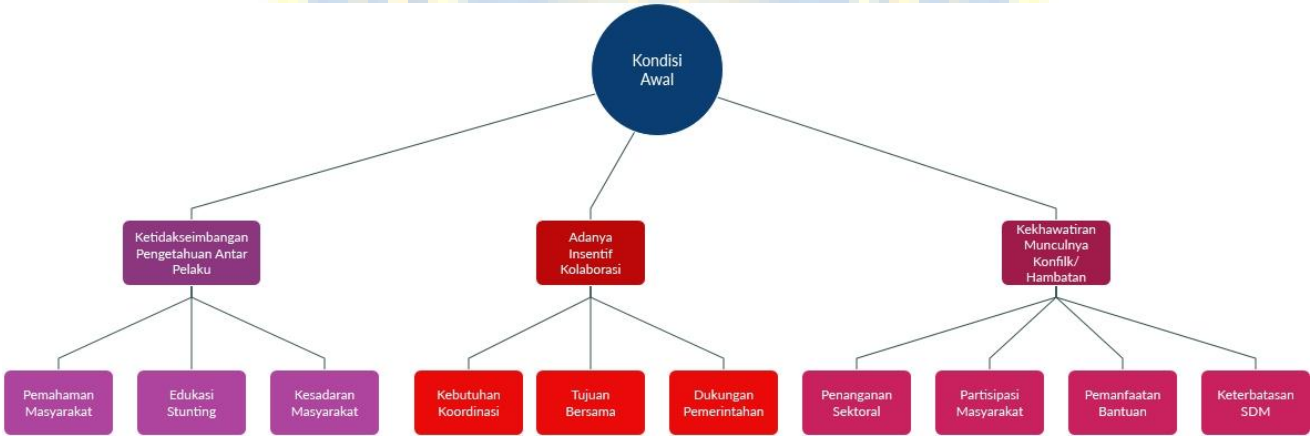

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 14, 2026

Berdasarkan Gambar 1, dimensi starting conditions dalam penanganan stunting di Kabupaten Minahasa Utara terbentuk dari tiga unsur utama yaitu ketidakseimbangan pengetahuan antar pelaku kolaborasi, adanya insentif kolaborasi, dan kekhawatiran munculnya konflik atau hambatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakseimbangan pengetahuan terlihat dari masih beragamnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai stunting, meskipun berbagai stakeholder telah melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap stunting masih menjadi salah satu tantangan dalam mendukung keberhasilan program penurunan prevalensi stunting.

Selain itu, penelitian menemukan adanya insentif yang mendorong para stakeholder untuk berkolaborasi. Insentif tersebut terlihat dari adanya kebutuhan koordinasi lintas sektor, tujuan bersama untuk menurunkan prevalensi stunting, serta dukungan pemerintah melalui pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S). Keberadaan TP3S menjadi wadah yang mempertemukan berbagai aktor untuk menyelaraskan program, sumber daya, dan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa para stakeholder memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga mendorong terbentuknya kolaborasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang berpotensi memengaruhi efektivitas kolaborasi. Hambatan tersebut meliputi masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada keluarga sasaran, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendampingan dan monitoring program. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu hubungan antar stakeholder karena setiap permasalahan dibahas melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang telah dibangun dalam forum kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi awal collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara dapat dikatakan cukup mendukung pelaksanaan kolaborasi. Adanya tujuan bersama, dukungan pemerintah, serta kesadaran para stakeholder terhadap pentingnya penanganan stunting menjadi modal utama dalam membangun kerja sama. Namun demikian, peningkatan pemahaman masyarakat, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu dilakukan agar proses kolaborasi dapat berjalan lebih efektif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa kondisi awal yang baik akan memengaruhi keberhasilan proses kolaborasi pada tahapan selanjutnya.

3.2. Desain Kelembagaan

Menurut Ansell dan Gash (2008), institutional design merupakan aturan, struktur, dan mekanisme yang mengatur jalannya kolaborasi antar stakeholder. Desain kelembagaan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktor memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menjalankan kolaborasi secara transparan dan akuntabel. Dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara, desain kelembagaan menjadi fondasi penting yang mengatur hubungan antar stakeholder dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

Gambar 2. Visualisasi Hasil Analisis NVivo Dimensi Desain Kelembagaan

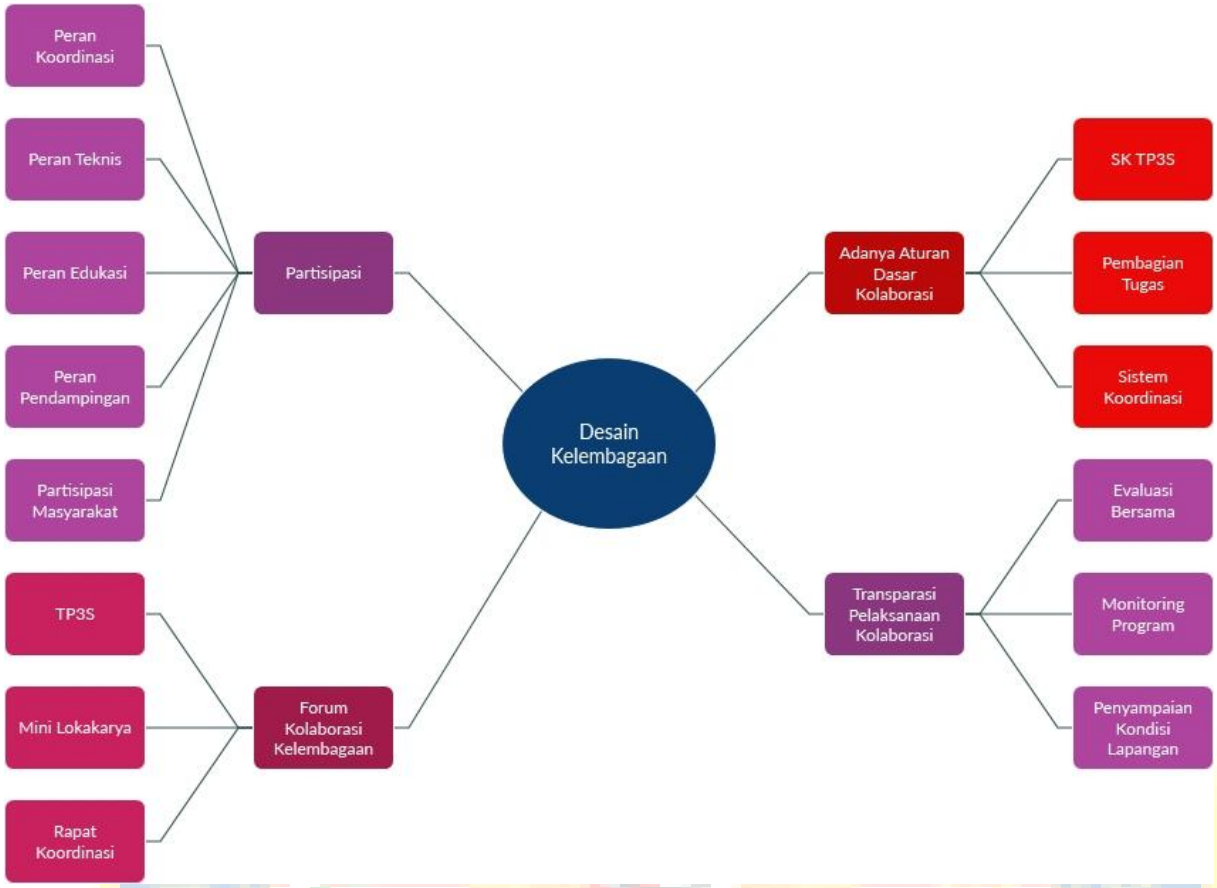

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 14, 2026

Berdasarkan Gambar 2, desain kelembagaan dalam penanganan stunting di Kabupaten Minahasa Utara ditunjukkan melalui partisipasi stakeholder, keberadaan forum kolaborasi kelembagaan, aturan dasar kolaborasi, serta transparansi pelaksanaan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai stakeholder memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. DPPKB berperan sebagai koordinator pelaksanaan program, Dinas Kesehatan menjalankan intervensi kesehatan spesifik, pemerintah kecamatan dan desa berperan dalam pelaksanaan program di wilayah masing-masing, sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus sasaran utama program penurunan stunting.

Forum kolaborasi kelembagaan diwujudkan melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), kegiatan mini lokakarya, serta rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala. Forum tersebut menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antar stakeholder dalam menyusun program, menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan, membahas kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah tindak lanjut. Keberadaan forum kolaborasi ini menunjukkan bahwa proses penanganan stunting tidak dilakukan secara sektoral, melainkan melalui mekanisme kerja sama lintas sektor yang terstruktur.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi didukung oleh adanya aturan dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan program. Aturan tersebut diwujudkan melalui Surat Keputusan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), pembagian tugas antar stakeholder, serta sistem koordinasi yang mengatur hubungan kerja antarinstansi. Kejelasan pembagian tugas membantu setiap stakeholder memahami tanggung jawabnya sehingga dapat mengurangi tumpang tindih pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas koordinasi.

Selain itu, transparansi pelaksanaan kolaborasi terlihat melalui kegiatan monitoring program, evaluasi bersama, dan penyampaian kondisi lapangan oleh masing-masing stakeholder. Mekanisme tersebut memungkinkan setiap pihak memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program serta berbagai permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Transparansi juga mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pelaksanaan program karena setiap stakeholder dapat mengetahui kontribusi dan capaian yang telah dilakukan oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, desain kelembagaan collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara telah terbentuk dengan cukup baik melalui keberadaan forum kolaborasi, aturan dasar yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang mendukung pelaksanaan program. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan koordinasi antar stakeholder masih diperlukan agar pelaksanaan kolaborasi dapat berjalan lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang mampu menjamin partisipasi, transparansi, dan kejelasan aturan bagi seluruh aktor yang terlibat.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Menurut Ansell dan Gash (2008), *facilitative leadership* merupakan kemampuan pemimpin dalam mendorong, memfasilitasi, dan menjaga keberlangsungan proses kolaborasi antar stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif tidak hanya berperan dalam mengarahkan pelaksanaan program, tetapi juga berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan pemberdaya yang mampu menyatukan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara, kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kolaborasi yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta unsur masyarakat.

Gambar 3. Visualisasi Hasil Analisis NVivo Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif

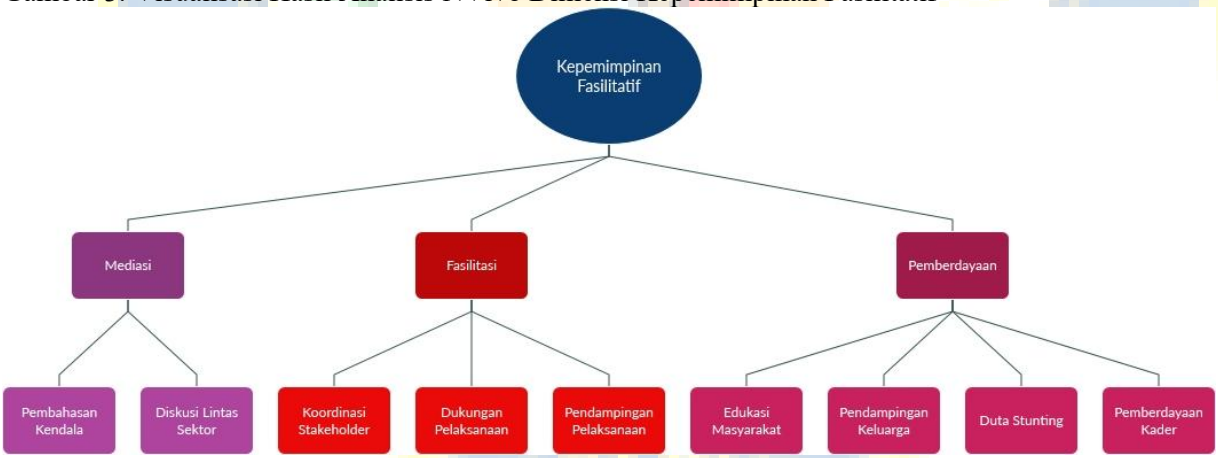

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 14, 2026

Berdasarkan Gambar 3, kepemimpinan fasilitatif dalam penanganan stunting di Kabupaten Minahasa Utara diwujudkan melalui fungsi mediasi, fasilitasi, dan pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKB sebagai koordinator TP3S memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antar stakeholder melalui pembahasan kendala dan diskusi lintas sektor yang dilakukan secara berkala. Melalui mekanisme tersebut, berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dapat dibahas bersama untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Peran mediasi ini menjadi penting mengingat penanganan stunting melibatkan banyak aktor dengan tugas dan kewenangan yang berbeda.

Selain berperan sebagai mediator, kepemimpinan fasilitatif juga diwujudkan melalui berbagai bentuk fasilitasi yang mendukung pelaksanaan program. Bentuk fasilitasi tersebut meliputi koordinasi antar stakeholder, dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan kepada pelaksana program di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi, mini lokakarya, dan forum TP3S mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting. Melalui koordinasi tersebut, setiap stakeholder dapat memahami perannya masing-masing sekaligus menyelaraskan kegiatan yang dilaksanakan agar tidak berjalan secara sektoral.

Kepemimpinan fasilitatif juga terlihat dari upaya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan pelaksana program. Bentuk pemberdayaan tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi masyarakat, pendampingan keluarga berisiko stunting, pembentukan dan penguatan peran duta stunting, serta pemberdayaan kader yang terlibat dalam pelaksanaan program di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan fasilitatif dalam collaborative governance penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan cukup baik. Peran koordinasi yang dilakukan oleh DPPKB bersama stakeholder terkait mampu menjaga keberlangsungan kolaborasi serta mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Namun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran masyarakat, dan perluasan jangkauan edukasi masih diperlukan agar proses pemberdayaan dapat berlangsung secara lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan pemimpin yang mampu memfasilitasi komunikasi, membangun kerja sama, dan mendorong partisipasi seluruh stakeholder dalam mencapai tujuan bersama.

3.4. Prosess Kolaborasi

Menurut Ansell dan Gash (2008), collaborative process merupakan inti dari collaborative governance yang menggambarkan bagaimana interaksi antar stakeholder berlangsung dalam mencapai tujuan bersama. Proses kolaborasi mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan antar pihak, komitmen terhadap proses, terciptanya pemahaman bersama, serta pencapaian hasil-hasil awal yang dapat memperkuat keberlanjutan kolaborasi. Dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara, proses kolaborasi menjadi faktor penting karena keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan berbagai stakeholder untuk bekerja sama secara berkelanjutan.

Gambar 2. Visualisasi Hasil Analisis NVivo Dimensi Proses Kolaborasi



Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 14, 2026

Berdasarkan Gambar 4, proses kolaborasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Minahasa Utara ditunjukkan melalui interaksi yang dilakukan melalui diskusi dan negosiasi, penguatan kepercayaan antar pihak, pembangunan komitmen bersama, berbagi pemahaman mengenai tujuan dan hambatan, serta pencapaian hasil awal yang mendukung keberlangsungan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antar stakeholder dilakukan melalui berbagai forum koordinasi, rapat lintas sektor, pembahasan kendala pelaksanaan program, dan evaluasi bersama. Forum-forum tersebut menjadi sarana komunikasi yang memungkinkan setiap stakeholder menyampaikan informasi, memberikan masukan, serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan stunting.

Proses kolaborasi juga memperlihatkan adanya penguatan kepercayaan antar stakeholder yang dibangun melalui kerja sama lintas sektor, keterlibatan aktif berbagai pihak, serta pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Kepercayaan tersebut berkembang karena masing-masing stakeholder memiliki peran yang jelas dan memahami kontribusi yang diberikan oleh pihak lain dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Dengan adanya kepercayaan, koordinasi yang dilakukan menjadi lebih efektif dan memudahkan pelaksanaan berbagai program yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Selain itu, penelitian menunjukkan adanya komitmen bersama yang diwujudkan melalui dukungan pemerintah daerah, keterlibatan organisasi perangkat daerah, serta partisipasi berbagai stakeholder dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Komitmen tersebut terlihat dari pelaksanaan berbagai kegiatan seperti pendampingan keluarga berisiko stunting, program orang tua

asuh, edukasi masyarakat, dan berbagai bentuk intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan. Keberadaan komitmen bersama menjadi faktor penting yang menjaga keberlangsungan kolaborasi meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program.

Proses kolaborasi juga menghasilkan pemahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Melalui berbagai forum koordinasi dan evaluasi, stakeholder memiliki kesempatan untuk memahami kondisi lapangan, tingkat partisipasi masyarakat, kendala pelaksanaan program, serta kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Pemahaman bersama tersebut membantu stakeholder menyelaraskan tindakan dan kebijakan sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih terintegrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang berlangsung juga menghasilkan berbagai capaian awal (intermediate outcomes) yang mendukung percepatan penurunan stunting. Capaian tersebut antara lain meningkatnya koordinasi program antar stakeholder, pelaksanaan pendataan stunting yang lebih terstruktur, penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan stunting, hasil-hasil awal tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun telah memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program penurunan stunting di Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan hasil penelitian, proses kolaborasi dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan melalui mekanisme komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang melibatkan berbagai stakeholder. Dialog yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membangun kepercayaan, memperkuat komitmen, dan menciptakan pemahaman bersama dalam pelaksanaan program. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan bantuan, serta penguatan kapasitas pelaksana program masih diperlukan agar hasil kolaborasi yang dicapai dapat lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan teori Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh kualitas proses interaksi yang terbangun antar stakeholder dalam mencapai tujuan bersama.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh peran satu instansi, tetapi merupakan hasil kolaborasi berbagai stakeholder yang terlibat dalam Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S). Penulis menemukan temuan penting bahwa kolaborasi yang dibangun melalui koordinasi lintas sektor, kepemimpinan fasilitatif, serta komitmen bersama antar stakeholder mampu mendorong pelaksanaan program penurunan stunting secara lebih terintegrasi. Keterlibatan DPPKB sebagai koordinator, Dinas Kesehatan sebagai pelaksana intervensi kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader, serta masyarakat menjadi faktor yang mendukung keberlangsungan kolaborasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Minahasa Utara.

Sama halnya dengan temuan Faidati dan Sukanti (2021), penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antar stakeholder menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program penanganan stunting. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Hidayasa et al. (2023) yang menemukan bahwa komitmen stakeholder dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam percepatan penurunan stunting. Dalam penelitian ini, koordinasi dilakukan melalui forum TP3S, rapat koordinasi, mini lokakarya, monitoring, dan evaluasi program yang melibatkan berbagai stakeholder terkait.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kondisi yang menarik. Meskipun kolaborasi telah berjalan dengan baik, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami stunting secara utuh, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan pencegahan stunting, serta

keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendampingan. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti keberhasilan pelaksanaan kolaborasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keberhasilan collaborative governance tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan forum kolaborasi dan keterlibatan stakeholder, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana program.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. DPPKB sebagai koordinator TP3S tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi, tetapi juga berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penghubung antar stakeholder. Temuan ini memperkuat teori Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan collaborative governance. Tanpa adanya kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai kepentingan, proses kolaborasi akan sulit berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa temuan penting yang diperoleh antara lain:

a. Penanganan stunting di Kabupaten Minahasa Utara telah dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai stakeholder.
b. Keberadaan TP3S menjadi wadah koordinasi yang memperkuat sinergi antar stakeholder dalam pelaksanaan program penurunan stunting.
c. Kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh DPPKB berperan penting dalam menjaga komunikasi, koordinasi, dan keberlangsungan kolaborasi.
d. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai stunting dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.
e. Kolaborasi yang terbangun telah menghasilkan berbagai capaian awal seperti peningkatan koordinasi program, penguatan pendampingan keluarga berisiko stunting, dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting.

Secara keseluruhan, pelaksanaan collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pelaksanaan program masih perlu dilakukan agar tujuan percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan collaborative governance pada upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu adanya komitmen stakeholder dalam mendukung program penurunan stunting, keberadaan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) sebagai wadah koordinasi lintas sektor, serta dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.

Selain itu, penulis juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan collaborative governance yaitu masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai stunting, rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan pencegahan stunting, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendampingan dan monitoring program, serta belum optimalnya pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada keluarga sasaran.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai stakeholder yang terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DPPKB), Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat. Kondisi awal kolaborasi didukung oleh adanya tujuan bersama untuk menurunkan prevalensi stunting meskipun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai stunting dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Desain kelembagaan kolaborasi telah terbentuk melalui keberadaan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), forum koordinasi, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan program. Kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh DPPKB sebagai koordinator TP3S berperan dalam memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar stakeholder sehingga kolaborasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Proses kolaborasi berlangsung melalui dialog, koordinasi, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman bersama antar stakeholder yang menghasilkan berbagai capaian awal dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pelaksanaan program masih diperlukan agar pelaksanaan collaborative governance dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara dapat berjalan lebih optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi *collaborative governance* pada lokus tersebut dan belum dapat menggambarkan kondisi pada daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada daerah lain atau menggunakan perspektif teori yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *collaborative governance* dalam upaya penurunan prevalensi stunting.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Minahasa Utara beserta seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan dukungan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bhutta, Z. A., Akseer, N., Keats, E. C., Vaivada, T., Baker, S. K., Horton, S. E., Katz, J., Menon, P., Piwoz, E. G., Shekar, M., Victora, C. G., & Black, R. E. (2020). *How countries can reduce child stunting at scale: Lessons from exemplar countries. The American Journal of Clinical Nutrition,* 112(Suppl. 2), 894S–904S. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa153

Faidati, N., & Sukanti. (2021). *Collaborative governance* dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabu,* 5(1), 91-113. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418

Hidayasa, dkk. (2023). *Collaborative governance* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial (JAPS), 4*(2), 83–90 https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.107

Hutasoit, I. (2017). Pengantar ilmu kependudukan. Alfabeta. http://eprints.ipdn.ac.id/5508/

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lahat, L., & Sher-Hadar, N. (2020). *A threefold perspective: Conditions for collaborative governance. Journal of Management and Governance,* 24(1), 77–100. https://doi.org/10.1007/s10997-019-09465-1

Leroy, J. L., & Frongillo, E. A. (2019). *Perspective: What does stunting really mean? A critical review of the evidence. Advances in Nutrition*, 10(2), 196–204. https://doi.org/10.1093/advances/nmy101

Nuranita Putri, E., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy and Management Review,* 10(2), 68-85. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/30594/0

Pusung, P. H., et al. (2024). *Mapping environmental problems in the new capital city of Nusantara as a foundation for sustainable development governance. Environment and Social Psychology*, 9(2), 1–10. https://doi.org/10.54517/esp.v9i2.1808

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan. Alfabeta.

Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Jafa, B. J. (2025). *Dynamic governance in reducing stunting in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia*. *Open Access Library Journal*, 12, 1–16. https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=141000

Sutikno, C., & Naufal, A. (2023). Proses *collaborative governance* penanggulangan stunting di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi, 12*(4). https://doi.org/10.33005/jdg.v12i4.3840

UNICEF. (2020). Situasi anak di Indonesia. UNICEF Indonesia.

Vaivada, T., Akseer, N., Akseer, S., Somaskandan, A., Stefopulos, M., & Bhutta, Z. A. (2020). *Stunting in childhood: An overview of global burden, trends, determinants, and drivers of decline. The American Journal of Clinical Nutrition, 112(Suppl. 2),* 777S–791S. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa159

World Health Organization. (2014). *Global nutrition targets* 2025: Stunting *policy brief. World Health Organization.* https://www.who.int/publications